
**Relasi Kuasa, Mekanisme dan Strategi Meraih Kekuasaan dalam Program
Social Forestry pada Taman Nasional Meru Betiri**

✉ Diah Puspaningrum dan Ati Kusmiati

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember

Received: September 2017; Accepted: Maret 2018; Published: April 2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.21107/agriekonomika.v7i1.3142>

ABSTRACT

Kehutanan Sosial (Social forestry) adalah upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat di sekitar hutan menjadi berdaya. Penelitian berupaya mengungkap proses pemberdayaan dalam kerangka kehutanan sosial (social forestry) yang dilakukan terhadap masyarakat desa hutan di kawasan Taman Nasional Meru Betiri dengan menggali relasi kuasa antara masyarakat desa hutan di kawasan Taman Nasional Meru Betiri dengan Taman Nasional Meru Betiri (Powerholders). Hubungan pertukaran antara masyarakat desa penyangga kawasan konservasi bersifat asimetris terutama dalam melaksanakan norma atau aturan konservasi. Dalam hubungan ini terdapat kekuasaan yang bersifat memaksa bagi warga masyarakat. Pengaruh dan hubungan kekuasaan dalam program pemberdayaan antara lembaga masyarakat desa penyangga dan Taman Nasional Meru Betiri adalah bersifat negatif karena hubungan tersebut terjadi proses kekuasaan yang berlangsung dari pemimpin ke pengikut (dari atas ke bawah) dan ada wewenang dalam pengelolaan kawasan konservasi. Mekanisme dan strategi meraih kekuasaan terkait dengan peran hukum dan aturan belum disadari sebagai suatu perjanjian bersama antara masyarakat dan taman nasional sebagai suatu konsensus bersama.

Kata kunci: Social Forestry, Relasi kuasa, Mekanisme dan Strategi, Taman Nasional Meru Betiri

The Relation Between Mechanisms and Strategies to Gain Power in Social Forestry Program in Meru Betiri National Park

ABSTRACT

Social forestry is conducted to empower community around the forest. The research aimed to find out the empowerment process in social forestry frame conducted on forest village community in the area of Meru Betiri National Park by digging power relation between the community and the Meru Betiri National Park (the power holders). Exchange relationship between buffer village-community of conservation area was asymmetric in nature, especially in the implementation of conservation norms or rules. In this relationship, there was a coercive power for the villagers. The influence and power relation in the empowerment program between buffer village-community institution and Meru Betiri National Park was negative since in the relationship power process was occurred between a leader and followers (top down) and there was authority in the management of conservation area. The mechanism and strategy to achieve power related to the role of law and rules were not yet realized as an agreement between the community and the national park as a common consensus.

Keywords: Social Forestry, Power Relation, Mechanism and Strategy, Meru Betiri National Park

PENDAHULUAN

Kehutanan sebagai sektor yang menguasai hamparan lahan yang paling luas yaitu 136,94 juta hektar atau 65% total luas wilayah Indonesia (Anwar & Hakim, 2010). Tetapi deforestasi dan degradasi hutan masih menjadi masalah krusial yang dihadapi sektor kehutanan saat ini. Menurut (Dephut, 2009) dalam (Anwar & Hakim, 2010), Laju deforestasi dan degradasi selama periode 2003 – 2008 mencapai 0,9 juta ha/tahun. Banyak faktor yang memicu terjadinya deforestasi dan degradasi hutan, diantaranya adalah kondisi sosial/kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan yang relatif masih rendah, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan, konflik tenurial yang sering berujung pada penyerobotan lahan, serta tidak seimbangnya *supply* dan *demand* kayu yang berpengaruh terhadap perkembangan industri perikanan nasional. Kondisi demikian telah menuntut kita untuk melakukan restorasi dalam pembangunan kehutanan Indonesia (Anwar & Hakim, 2010).

Kehutanan Sosial (*Social Forestry*) adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat setempat adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan atau sekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial didasarkan pada mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan.

Sebagian besar masyarakat di sekitar hutan memiliki alternatif terbatas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga karena alasan terpaksa, masyarakat melakukan kegiatan yang bersifat ilegal dalam memenuhi kebutuhannya. Hal itu dilakukan karena keterbatasan akses terhadap

sumber kehidupan yang lain. Salah satu penyebab yang terbesar adalah ketidakberdayaan struktural yang dimiliki oleh masyarakat desa sekitar hutan. *Social forestry* adalah upaya untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Hutan tidak mungkin terjaga kelestariannya apabila kondisi masyarakat di sekitar hutan dalam kondisi miskin dan tidak berdaya. Mereka harus lebih berdaya dengan memiliki kekuasaan yang lebih besar terhadap sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Kehutanan Sosial (*Social forestry*) adalah upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat di sekitar hutan menjadi berdaya.

Berdasarkan latar belakang dan fokus permasalahan diatas peneliti berupaya mengungkap proses pemberdayaan dalam kerangka *social forestry* yang dilakukan terhadap masyarakat desa hutan di kawasan Taman Nasional Meru Betiri dengan menggali bagaimana relasi kuasa antara masyarakat desa hutan di kawasan Taman Nasional Meru Betiri dengan *powerholders* (Taman Nasional Meru Betiri). Berbagai penelitian yang telah dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri terkait dengan kehutanan sosial (*social forestry*), dimana pendekatan penelitian yang dilakukan umumnya dengan paradigma kuantitatif. Masih relatif sedikit peneliti yang melakukan dengan pendekatan kualitatif. disamping itu penelitian dilakukan lebih kepada evaluasi program kehutanan sosial (*social forestry*) yang telah diimplementasikan walaupun aspek-aspek sosial sudah banyak yang diungkapkan termasuk partisipasi dari masyarakat lokal. Sedangkan penelitian dengan paradigma kritis yang bertujuan untuk menyingkap dominasi belum banyak dilakukan. Jadi penelitian ini adalah untuk mengisi kekosongan penelitian yang ada dengan menggunakan paradigma kritis pada pengelolaan sumberdaya hutan di bawah payung *social forestry*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis relasi kuasa dalam proses pemberdayaan yang di-

lakukan terhadap masyarakat desa hutan di kawasan Taman Nasional Meru Betiri; 2) Untuk dapat menyusun model strategi dan Mekanisme dalam meraih kekuasaan yang bertujuan meningkatkan relasi kuasa masyarakat desa hutan serta mendukung terjadinya kemandirian masyarakat desa hutan dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam hutan. Dalam proses pemberdayaan tersebut akan diteliti relasi kuasa antara Taman Nasional Meru Betiri (*powerholder*) dan masyarakat desa hutan dalam proses pemberdayaan menggunakan teori kekuasaan dari Richard A. Schermerhorn dan Robert Bierstedt. Teori kekuasaan dari Richard A. Schermerhorn untuk memahami fenomena relasi kuasa bersifat simetris atau asimetris serta orientasi emosional dalam hubungan berpasangan antara Taman Nasional Meru Betiri dan masyarakat desa hutan; mekanisme dan strategi kekuasaan menggunakan teori Foucault dimana kekuasaan itu menyebar dan bisa diperoleh melalui mekanisme dan strategi: a). peran hukum dan aturan, b) tujuan kekuasaan, c) kekuasaan tidak dialokasikan tetapi terdapat dimana-mana, d) kekuasaan yang mengarah keatas dan e) kombinasi antara kekuasaan dan ideology. Sedangkan paradigma yang digunakan adalah paradigm kritis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (*case study*) yaitu penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subyek penelitian bisa individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat (Nazir, 2011). Penelitian ini hendak mengetahui mengapa pemberdayaan melalui program *social forestry* belum membawa dampak yang signifikan dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Metode penentuan daerah penelitian dilakukan secara *purposive methods* (metode secara sengaja) yaitu di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember karena desa tersebut meru-

pakan salah satu desa penyangga di kawasan Taman Nasional Meru Betiri Jawa Timur yang melakukan program kehutanan sosial (*social forestry*)

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu kata-kata dan tindakan dari *key informant/stakeholder* yaitu berasal dari: Taman Nasional Meru Betiri (*Powerholder*), kelembagaan yang terlibat langsung: SPKP (Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan), Ketan Merah (Kelompok Tani Mitra Rehabilitasi), Masyarakat Mitra Polisi Hutan (MMP) dan Kelompok Peternak Lembah Meru di Taman Nasional Meru Betiri (TNMB), sedangkan data sekunder didapat dari sumber tertulis, foto, dokumentasi yang diperoleh dari berbagai instansi dan lembaga yang terkait dalam pengelolaan hutan di Taman Nasional Meru Betiri.

Pengumpulan data diperoleh secara primer dari hasil observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*) terkait dengan penggalian informasi Kekuasaan dan wewenang yang diberikan oleh Taman Nasional Meru Betiri serta mekanisme dan strategi kekuasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa hutan untuk mendapatkan kekuasaan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Sebagai penguji keabsahan data melalui triangulasi baik teknik, sumber dan teori. Triangulasi sumber yaitu mengumpulkan data sejenis dari sumber berbeda, triangulasi metode, yakni mengumpulkan data yang sejenis dengan menggunakan teknik atau pengumpulan data yang berbeda, serta triangulasi teori untuk menginterpretasikan data yang sejenis yang berbeda (Aman, 2011). Sedangkan menurut (Miles & Huberman, 1992), Analisis data menggunakan model interaktif menurut (Miles & Huberman, 1992). Langkah-langkah analisis data mulai dilakukan dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis data dilakukan secara berulang dan berlangsung secara simultan sampai ditemukan kesimpulan yang tepat, yang tidak terdapat kasus negatif yang menyanggah, terlihat mata

rantai proses analisis secara utuh dan logis, dan diakui kebenarannya oleh informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Relasi Kuasa Masyarakat Desa Penyangga dengan *Powerholder*

a. Pertukaran dan Kekuasaan dalam Kehidupan Sosial

Menurut Teori Pertukaran dan Kekuasaan Blau dalam Poloma, (2004) apa yang menarik individu masuk kedalam ososiasi? Jawaban Blau ialah “mereka tertarik pada pertukaran karena mengharapkan ganjaran yang intrinsik maupun ekstrinsik”. Bahwa perilaku manusia dibimbing oleh pertimbangan pertukaran sosial walaupun tidak semua tetapi kebanyakan memang demikian. Dua persyaratan yang harus dipenuhi yang menjurus pada pertukaran sosial (1) perilaku tersebut harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya bisa dicapai melalui interaksi dengan orang lain” dan (2) perilaku tersebut bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian-pencapaian tujuan tersebut. Perilaku manusia yang dibimbing prinsip-prinsip pertukaran sosial itu, mendasari pembentukan struktur dan lembaga-lembaga sosial. Dalam lembaga Masyarakat Mitra Polhut (MMP) seseorang yang bergabung menjadi anggota dari lembaga tersebut juga mengharapkan adanya ganjaran intrinsik maupun ekstrinsik dari Taman Nasional Meru Betiri. Hal ini diungkapkan oleh key informant anggota Masyarakat Mitra Polhut sebagai berikut.

Sebagai MMP mendapatkan rewards: upah/gaji Rp. 1.125.000,- dengan perhitungan Rp. 75.000 per/hari dengan hari kerja efektif 15 hari, mendapatkan seragam, dan dengan kebijakan pimpinan mendapatkan THR dari dana DIPA. Dengan menjadi anggota MMP yang dahulunya dianggap orang “biasa” tapi sekarang dianggap petugas oleh masyarakat/ tidak diremehkan.

Ganjaran ekstrinsik yang diterima anggota MMP berupa gaji, tunjangan dan seragam serta ganjaran intrinsik berupa pengakuan dari masyarakat dengan men-

ingkatnya status sosial sehingga bukan menjadi warga masyarakat biasa lagi. Dengan adanya pertukaran itu anggota MMP ini bertahan di lembaga MMP mulai pembentukan MMP pada tahun 2010.

Tidak semua transaksi sosial bersifat simetris dan berdasarkan pertukaran sosial yang seimbang. Transaksi sosial antara lembaga sosial masyarakat desa penyangga dengan Taman Nasional Betiri belum bersifat simetris. Lembaga sosial yang ada belum memiliki wewenang yang cukup untuk mengambil keputusan terkait dengan kegiatan lembaga. Keputusan yang diambil lembaga terkait dengan kawasan konservasi harus mendapat persetujuan dari Taman Nasional Meru Betiri. Hal ini diungkapkan oleh key informant yang menjabat sebagai ketua SPKP sebagai berikut:

Kelompok SPKP masih berada dibawah naungan Taman Nasional Meru Betiri sehingga keikutsertaan dalam kegiatan konservasi dilakukan jika telah dikordinasikan oleh pihak taman nasional. Kegiatan yang berhubungan dengan hutan konservasi harus disetujui oleh taman nasional. Keputusan yang berasal dari kelompok kemudian diajukan kepada taman nasional untuk dibantu dan difasilitasi. Sejauh ini keputusan dari kelompok belum ada yang terlaksana. Seperti budidaya ikan lele dan pembuatan buku penyuluhan yang belum terealisasi dikarenakan tidak memiliki modal. Kegiatan yang pernah berjalan adalah budidaya tanaman anggrek namun gagal. Kelompok tidak memahami teknik budidayanya dan prospek kedepannya dikarenakan tidak ada pembinaan dari taman nasional.

Suatu hubungan kekuasaan yang bersifat memaksa merupakan hubungan pertukaran yang tidak seimbang yang dipertahankan melalui sanksi-sanksi negatif Sanksi negatif juga diberlakukan pada masyarakat desa penyangga apabila melanggar aturan konservasi dari Taman Nasional Meru Betiri. Hal ini diungkapkan oleh key informant yang menjabat sebagai ketua Kelompok Petani Mitra Rehabilitasi (Ketan Merah) sebagai berikut:

Konflik yang terjadi yaitu seorang masyarakat desa yang juga menjabat

sebagai ketua kelompok melanggar aturan taman nasional dengan menebang pohon. Orang tersebut melanggar aturan kemudian dilaporkan oleh masyarakat dan penindakan oleh pihak berwajib sampai dipenjara selama 6 bulan. Kejadian tersebut menjadi pelajaran kedepannya dan membuat beberapa masyarakat lebih mentaati peraturan yang dijalankan.

Hubungan pertukaran antara masyarakat desa penyangga kawasan konservasi bersifat asimetris terutama dalam melaksanakan norma atau aturan konservasi. Dalam hubungan ini terdapat kekuasaan yang bersifat memaksa bagi warga masyarakat desa penyangga kawasan konservasi. Sanksi negatif akan diterapkan oleh Taman Nasional Meru Betiri apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan dan norma konservasi yang dilakukan oleh masyarakat desa penyangga tersebut. Apabila pelanggaran tersebut berat maka akan dilaporkan kepada pihak berwajib dan mendapatkan sanksi hukum.

Blau dalam (Poloma, 2004) memberikan batasan kekuasaan sesuai dengan pengertian Weberian, yaitu "kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain, walaupun terdapat penolakan melalui perlawanan, baik dalam bentuk pengurangan pemberian ganjaran secara teratur maupun dalam bentuk hukuman, sejauh kedua hal itu ada, dengan memperlakukan sangsi negatif". Dengan demikian kekuasaan hanya dapat dilihat sebagai pengendalian melalui sangsi-sangsi negatif, dimana kekerasan fisik atau ancamannya-merupakan kutub polar dari kekuasaan. "Hanya perintah-perintah kekuasaan sah yang akan dipatuhi". Istilah lain kekuasaan yang sah itu ialah *otoritas*. Dalam organisasi formal hubungan yang asimetris dapat dilestarikan melalui kekuasaan yang memaksa. Kekuasaan memaksa merupakan pertukaran yang tidak seimbang (Poloma, 2004). Hal ini seperti yang disampaikan oleh narasumber yang menjabat sebagai ketua SPKP.

Aturan konservasi harus dipatuhi karena tanah yang digarap (lahan rehab) adalah kawasan konservasi. Pihak taman na-

sional melakukan penyuluhan dan himbauan melalui pertemuan kelompok sekaligus memberikan pembenaran terhadap pelaksanaan aturan.

Berdasarkan pernyataan key informant diatas bahwa masyarakat desa penyangga kawasan konservasi telah menerima Taman Nasional Meru Betiri sebagai pemegang "*otoritas*" yang sah dalam mengelola kawasan konservasi. Mereka menerima secara sukarela segala aturan yang telah ditetapkan otoritas kawasan konservasi tersebut karena lahan yang mereka garap/kelola adalah lahan rehabilitasi yang merupakan kawasan konservasi.

Wewenang berdasarkan atas norma-norma atau aturan-aturan bersama menggariskan perilaku dalam suatu kelompok. Norma-norma itu memaksa individu mematuhi aturan dari mereka yang berkuasa. Norma-norma demikian diinternalisir oleh anggota kelompok dan dipaksakan kepada mereka, "ukuran-ukuran normatif yang mendasari wewenang yang terlembaga tidak lahir dalam proses interaksi sosial dalam proses sosialiasasi di mana setiap orang secara terpisah mengakui kebudayaan bersama".

Norma-norma dalam rangka mempertahankan kawasan konservasi juga digariskan sebagai aturan kelompok yang diinternalisir oleh anggota kelompok. Hal ini disampaikan narasumber dari masyarakat desa penyangga yang menjabat sebagai ketua Lembaga Lembah Meru yaitu sebagai berikut:

Terdapat aturan yang dipahami anggota kelompok seperti larangan untuk mengambil flora dan fauna yang ada di kawasan hutan konservasi. Ketua kelompok bertugas memberikan contoh dan menghimbau anggota kelompok untuk menaati aturan tersebut. Kelompok lembah meru banyak berperan dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui bidang usaha yang dijalankan dalam rangka mengurangi eksploitasi SDA yang ada di hutan konservasi.

Keanggotaan kelompok bertumpu pada nilai-nilai serta norma-norma yang disetujui bersama. Walaupun pertukaran berfungsi sebagai basis interaksi personal

yang paling dasar, akan tetapi nilai-nilai sosial yang diterima bersama, berfungsi sebagai media transaksi sosial bagi organisasi serta kelompok-kelompok sosial. Nilai-nilai sosial bersama merupakan kunci untuk memahami kekuasaan dan pertukaran sosial dalam kolektivitas besar.

Menurut Blau dalam (Poloma, 2004) bahwa kompleksitas pola-pola kehidupan sosial yang dijembatani oleh nilai-nilai bersama akan melembaga dan akan abadi bilamana dipenuhi tiga persyaratan: 1) Prinsip-prinsip yang diorganisir harus merupakan bagian dari prosedur-prosedur yang diorganisir harus merupakan bagian dari prosedur yang diformalisir (konstitusi dan dokumen lainnya), sehingga setiap saat bebas dari orang yang melaksanakannya; 2) Nilai-nilai sosial yang mengesahkan bentuk institusional itu harus diwariskan kepada generasi selanjutnya melalui proses sosialisasi; 3) Kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat harus menganut nilai-nilai itu serta harus meminjamkan kekuasaannya untuk mendukung lembaga-lembaga yang memasyarakatkan nilai-nilai tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka usulan dari key informant terkait perlunya prosedur yang diformalisir terkait pengelolaan lahan rehabilitasi dalam kawasan konservasi harus segera dibuatkan dokumen yang sah. Prosedur yang diformalisir (konstitusi dan dokumen lainnya) dibuat untuk menjamin pelembagaan nilai dan norma dalam kehidupan sosial. Disamping itu pelaksanaannya tidak akan dipengaruhi oleh pergantian petugas pelaksana. Pernyataan key informant tersebut sebagai berikut:

Saat ini upaya yang dilakukan Taman Nasional "kurang jitu" karena banyak pelanggaran dan sanksi yang diberikan kurang tegas. Perlu "di dog" (red: diputuskan) adanya perjanjian kerjasama antara petani dan TNMB yang memiliki kekuatan hukum sehingga apabila melakukan pelanggaran maka tidak bisa mengelak karena ada dokumen yang resmi sehingga TNMB juga dapat memberikan sanksi yang jelas. Ada Kesan TNMB

masih sangat longgar dalam menerapkan aturan. Mestinya petani yang menggarap lahan rehap harus diberi batasan yang jelas berapa tahun tanaman pokok harus hidup dan apabila dilanggar harus keluar dari lahan rehabilitasi. Hal ini merupakan strategi yang jitu sehingga tujuan konservasi bisa berhasil.

Sedangkan persyaratan kelompok yang dominan "harus meminjamkan kekuasaannya untuk mendukung lembaga-lembaga yang memasyarakatkan nilai-nilai tersebut" harus dijadikan perhatian oleh Taman Nasional Meru Betiri terutama kekuasaan dalam mengembangkan bidang ekonominya dengan mengembangkan usaha ekonomi produktif. Ekonomi merupakan fungsi adaptasi dalam pembentukan struktur sistem sosial. Sedangkan untuk kekuasaan dalam mengelola lahan rehabilitasi tidak bisa diganggu gugat dan merupakan kekuasaan penuh bagi Taman Nasional sebagai pemegang "otoritas" kawasan konservasi.

b. Pengaruh dan Hubungan Kekuasaan Antara Masyarakat Desa Penyangga dengan Taman Nasional Meru Betiri

Hubungan yang terjadi antara lembaga sosial masyarakat desa penyangga kawasan konservasi yaitu antara lembaga Tani Mitra Rehabilitasi (Ketan Merah), Lembaga Masyarakat Mitra Polisi Hutan (MMP), dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Konservasi (LMDHK) dengan Taman Nasional Meru Betiri bersifat asimetris karena hubungan yang terjadi didasarkan pada tekanan atau "pressure" dalam pengelolaan kawasan konservasi. Hubungan kekuasaan yang bersifat asimetris adalah: 1) tunduk pada seorang pemimpin karena jabatannya (*tokoh institusional*); 2) Tunduk pada seseorang karena kekuatannya atau kemampuannya menggunakan kekerasan; 3) Tunduk pada seorang tokoh karena kebiasaan. Hubungan kekuasaan yang pokok, yakni: 1) Proses kekuasaan berlangsung dari pemimpin ke pengikut (dari atas kebawah); 2) Ada wewenang. Tipe hubungan asimetris yang pertama dan kedua bersifat koersif. Sedangkan tipe ketiga

bersifat habitual. Pada tipe ini tidak terjadi keterlibatan secara emosional. Sudah menjadi kebiasaan bahwa orang yang lebih rendah kedudukannya menerima perintah dari atasannya, sehingga penyesuaian diri terhadap perintah itu berlangsung dengan sendirinya.

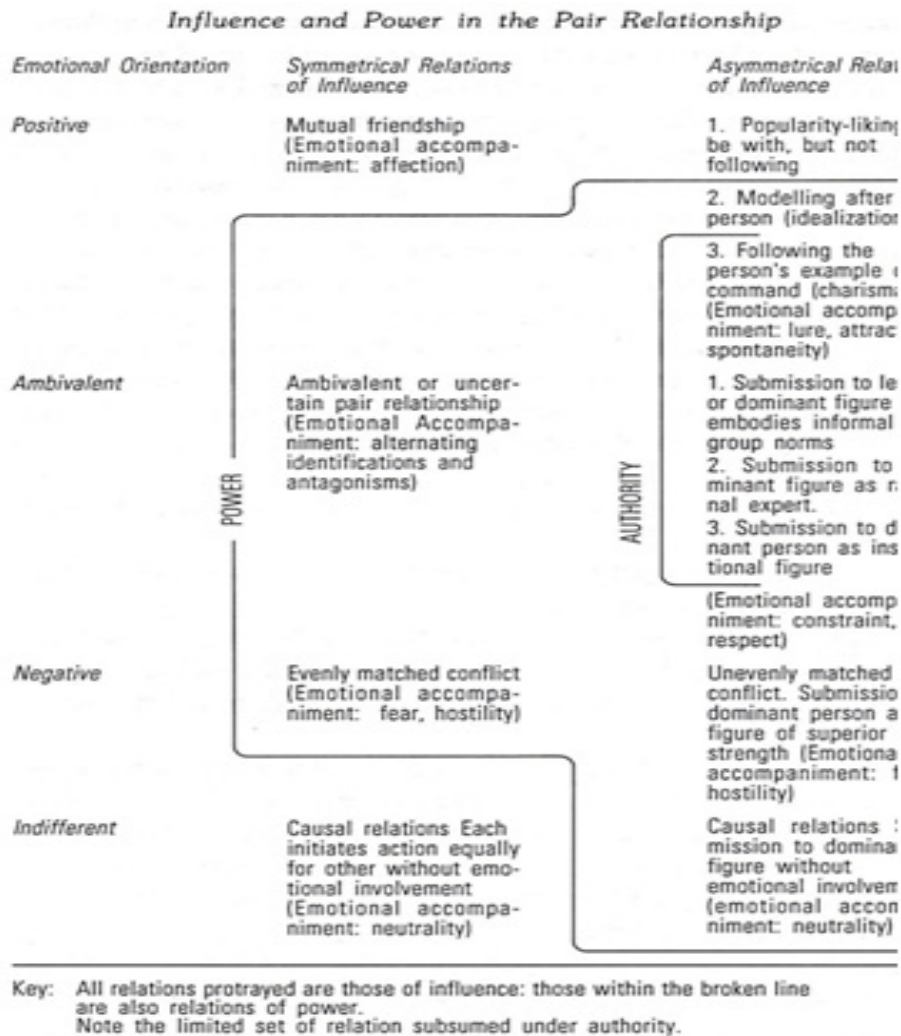
Pengaruh dan hubungan kekuasaan dalam program pemberdayaan antara lembaga masyarakat desa penyangga dan Taman Nasional Meru Betiri adalah tunduk pada seorang pemimpin karena jabatannya (*tokoh institusional*) dan tunduk pada seseorang karena kekuatannya atau kemampuannya menggunakan kekerasan. Dimana kesemua hubungan tersebut terjadi proses kekuasaan yang

berlangsung dari pemimpin ke pengikut (dari atas ke bawah) dan ada wewenang dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Berdasarkan Gambar diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh dan hubungan kekuasaan antara lembaga masyarakat desa penyangga bersifat negatif karena patuh dan tunduk kepada seseorang karena masih disebabkan jabatan yang dimiliki seseorang tersebut dan karena kekuatannya atau kemampuannya menggunakan kekerasan.

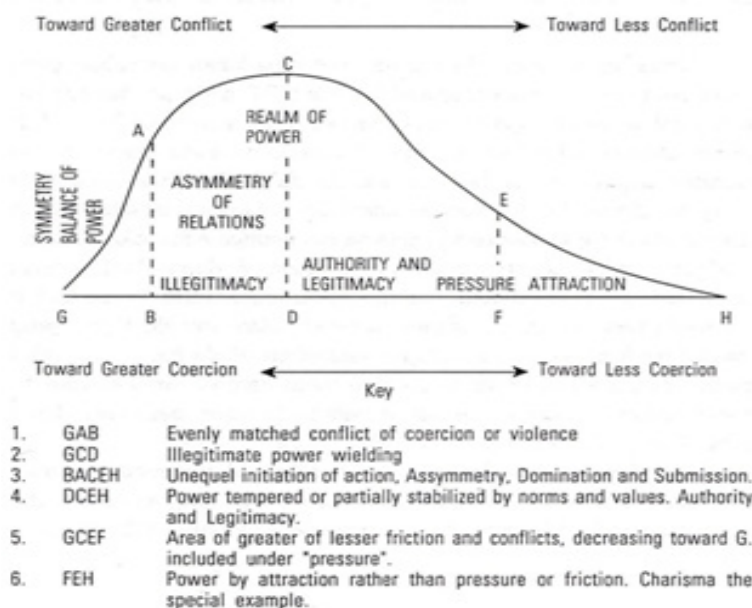
Gambar 2. Pengaruh Tekanan pada Konflik

Sumber: Schermerhorn 1964 dalam Soekanto (2001)



Sumber: Schermerhorn, 1964 dalam Soekanto, 2001

Gambar 1
Pengaruh dan Kekuasaan dalam Hubungan Berpasangan



Sumber: Schermerhorn, 1964 dalam Soekanto, 2001

Gambar 2
Pengaruh Tekanan pada Konflik

Sedangkan apabila berdasarkan Gambar diatas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan yang diterapkan pada lembaga masyarakat desa penyangga kawasan konservasi terletak pada bidang DCEH dimana terdapat kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh Taman Nasional Meru Betiri dalam menjaga kawasan konservasi dari gangguan pencurian, perambahan yang dilakukan oleh masyarakat dalam kawasan maupun masyarakat yang berada di luar kawasan. Pelaksanaan kekuasaan itu dengan menggunakan nilai dan norma dalam pengelolaan kawasan konservasi.

c. Strategi dan Mekanisme Meraih Kekuasaan Masyarakat Desa Penyangga Kawasan Konservasi

Dari gagasan *kekuasaan sebagai suatu strategi dan mekanisme*; beberapa metodologis kekuasaan yang menjadi fokus perhatian Foucault yaitu: 1). *Peran hukum dan aturan-aturan*. Foucault mengatakan "kuasa tidak selalu bekerja melalui represif dan intimidasi melainkan pertama-tama bekerja melalui aturan-aturan dan normalisasi" (Kebung, 2008). Segala aturan dan hukum pertama tidak dilihat sebagai hasil dari ketentuan pemimpin

atau institusi tertentu tetapi sebagai sintesis dari kekuasaan setiap orang yang lahir karena *perjanjian*. Segala aturan yang lahir karena konsensus bersama memiliki kekuatan yang lebih dalam hidup bersama. 2). *Tujuan kekuasaan*. Tujuan dari adanya mekanisme kekuasaan ialah membentuk setiap individu untuk memiliki dedikasi dan disiplin diri agar menjadi pribadi yang produktif (Haryatmoko, 2003). Setiap orang diberi ruang untuk berpikir, berkembang dan dengan bebas menyampaikan aspirasinya demi kemajuan bersama; 3). *Kekuasaan itu tidak dilokalisasi tetapi terdapat di mana-mana*. Kesadaran akan kekuatan dari suatu negara dan masyarakat tidak dibatasi hanya dari para pemimpin tetapi atas kerjasama setiap pribadi dan lembaga yang memiliki orientasi produktif. Misalnya, dengan adanya ruang komunikasi antara pemimpin dan warganya, kesatuan tercipta dalam suasana dialogis dan mengarah kepada cita-cita bersama; 4). *kekuasaan yang mengarah ke atas* (Foucault:2002). Dalam arti ini, kekuasaan setiap orang dan lembaga dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga membentuk konsensus bersama atau dengan kata lain hasil dari

proses komunikasi kekuasaan bersama akan menghasilkan *kekuasaan bersama* atau dalam bahasa, Thomas Kuhn, adanya *paradigma bersama* (Kuhn, 2000). *kombinasi antara kekuasaan dan Ideologi*. Setiap anggota dalam masyarakat kurang lebih memiliki impian yang sama yaitu adanya pengakuan hal setiap orang yang terarah pada kesejahteraan bersama. Harapan ini harus berjalan bersama dengan kekuasaan bersama. Segala hukum dan aturan diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Mekanisme dan strategi meraih kekuasaan terkait dengan peran hukum dan aturan masih dilihat dan dirasakan oleh masyarakat desa penyangga kawasan konservasi sebagai produk dari penguasa dalam hal ini adalah Taman Nasional Meru Betiri. Peran hukum dan aturan ini belum disadari sebagai suatu perjanjian bersama antara masyarakat dan taman nasional sebagai suatu konsensus bersama sehingga memiliki kekuatan yang lebih dalam hidup bersama terutama dalam menjaga kawasan konservasi dari segala ancaman dan gangguan.

Mekanisme dan strategi meraih kekuasaan terkait dengan tujuan kekuasaan sebenarnya telah dilakukan oleh Taman Nasional Meru Betiri terhadap masyarakat desa penyangga kawasan konservasi sehingga dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa penyangga sehingga menjadi manusia yang produktif. Hanya saja dalam pelaksanaannya pemberdayaan sebagai proses maupun sebagai tujuan belum tercapai seperti yang diharapkan. Ketidakberhasilan ini disebabkan berbagai faktor antara lain, sumberdaya manusia baik petugas yang terbatas dan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah, keterbatasan sumber biaya, penetapan kegiatan di masing-masing lembaga yang kurang sesuai dengan kearifan lokal, kurangnya kerativitas dan partisipasi masyarakat, serta kapasitas kelembagaan yang masih rendah.

Mekanisme dan strategi meraih kekuasaan dengan menciptakan hubungan

yang dialogis dan simetri belum bisa dilaksanakan karena kekuasaan dominan masih tetap dimiliki oleh Taman Nasional Meru Betiri terutama terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi. Tetapi taman nasional telah memberi ruang yang cukup kepada individu maupun lembaga dalam mencipatakan tujuan bersama yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat desa penyangga kawasan konservasi tetapi kelestarian hutan tetap terjaga. Hal ini diupayakan dengan menciptakan berbagai peluang usaha dan pengembangan usaha ekonomi produktif.

Mekanisme dan strategi dengan menciptakan paradigma bersama dimana masyarakat desa penyangga kawasan konservasi memiliki kekuasaan yang simetri dengan memiliki kekuasaan dalam komunikasi belum tercapai. Komunikasi masih dilakukan secara dominan dari atas ke bawah. Pihak bawah (baca masyarakat desa penyangga kawasan konservasi) belum memiliki inisiatif untuk melakukan komunikasi dengan taman nasional sehingga segala keputusan masih dominan berasal dari atas ke bawah. Hal ini mengakibatkan belum tercapainya kekuasaan bersama antara masyarakat desa penyangga kawasan konservasi dengan taman nasional.

Mekanisme dan strategi dengan mewujudkan kombinasi antara kekuasaan dan ideologi juga belum terwujud karena sampai saat ini pun masih terjadi berbagai gangguan dan pencurian/perambahan terhadap kawasan konservasi baik yang berasal dari dalam kawasan dan luar kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya ideologi yang sama antara masyarakat dengan taman nasional. Ideologi yang harus diwujudkan oleh taman nasional adalah kelestarian hutan. Ideologi yang dimiliki masyarakat harus diketahui, dipahami dan dilaksanakan melalui proses sosialisasi dan internalisasi oleh masing-masing individu.

Mekanisme dan strategi meraih kekuasaan juga harus memperhatikan sumber-sumber kekuasaan. Menurut Bierstedt dalam (Soekanto, 2002) bahwa

sumber kekuasaan adalah: 1) sejumlah manusia, 2) organisasi sosial, dan 3) sumberdaya. Hal ini terutama ada pada hubungan antar kelompok. Secara umum, suatu kelompok besar yang banyak anggotanya dengan organisasi kohesif dan sarana yang cukup, akan dapat mengatasi kelompok lain yang kurang kualitasnya. Apabila konsep sumberdaya jelas, maka hal itu dapat membatasi kekuasaan pada bidang hubungan antarkelompok. Sumber kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat desa penyangga kawasan konservasi adalah anggota masyarakat yang banyak. Potensi sumberdaya manusia yang banyak disertai dengan kualitas sumberdaya yang tinggi akan melahirkan sumber kekuasaan yang besar. Organisasi sosial yang dimiliki oleh masyarakat desa penyangga sebenarnya mampu untuk dijadikan wadah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui kegiatan pendidikan dan ketrampilan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif sehingga kesejahteraan masyarakat desa penyangga kawasan konservasi dapat meningkat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa penyangga akan mengurangi gangguan terhadap kawasan konservasi sehingga kelestarian kawasan dapat terjaga.

Sumberdaya yang dimiliki oleh Taman Nasional Meru Betiri adalah berbagai sumberdaya yang dapat mengembangkan atau memperkuat posisi kekuasaan, yakni: 1) Kekuasaan militer, polisi atau kriminal untuk mengendalikan kekerasan. Kekuasaan ini dijalankan oleh Polisi Hutan (Polhut) dan Masyarakat Mitra Polhut; 2) Kekuasaan ekonomi untuk mengendalikan tanah, tenaga kerja, kekayaan maupun produksi; kekuasaan ini berwujud lahan rehabilitasi yang dapat dikelola oleh masyarakat desa penyangga kawasan konservasi 3) Kekuasaan politik untuk mengendalikan pengambilan keputusan yang sah (resmi), kekuasaan ini terwujud dalam berbagai produk aturan/ norma dan hukum konservasi baik tertulis maupun tidak tertulis yang memiliki kekuatan hukum (legal dan formal) sehingga kekuasaan ini bersifat dominan.

Sedangkan sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat desa penyangga kawasan konservasi yang dapat mengembangkan atau memperkuat posisi kekuasaan adalah **Kekuasaan tradisional** dimana terdapat asumsi bahwa masyarakat lokal yang paling mengetahui akan potensi dan kebutuhan yang masyarakat sendiri. **Kekuasaan ideologis** yang dimiliki oleh masyarakat desa penyangga kawasan konservasi yaitu untuk mengendalikan sistem kepercayaan dan nilai-nilai, agama, pendidikan, pengetahuan khusus, dan propaganda. Tetapi kekuasaan ini harus dilakukan dengan pembentukan kepribadian sehingga dapat merubah perilaku yang positif anggota masyarakat desa dalam interaksinya dengan kawasan konservasi. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat perlu ditingkatkan dalam peningkatan kekuasaan dalam aspek ini. Peran lembaga sosial dan lembaga keluarga juga sangat krusial dalam pembentukan kepribadian terutama dalam proses sosialisasi dan internalisasi nilai, norma atau aturan dalam aturan konservasi.

2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa Penyangga melalui Strategi dan Mekanisme Meraih Kekuasaan

a. Potensi dan Sumberdaya Desa Penyangga Kawasan Konservasi serta Permasalahannya

Kegiatan budidaya di desa adalah tanaman pangan (padi, jangung), palawija, nangka dan pete. Kendala yang dihadapi adalah hama dan cuaca yang menyebabkan penurunan hasil panen. Pada lahan rehab terdapat kendala serangan hama seperti serangga, babi hutan, dan hewan ternak yang memakan daun nangka. Selain itu tanaman pete yang dianjurkan Taman Nasional Meru Betiri banyak yang mati dan menyebabkan kerugian. Kesulitan yang dihadapi masyarakat ini adalah sumberdaya manusia yang kurang sehingga potensi yang ada belum bisa dimaksimalkan. Kebanyakan masyarakat desa merantau ke luar negeri seperti Malaysia, Taiwan, Singapore dan Brunei bekerja sebagai TKI.

Desa Wonoasri membutuhkan pembukaan lapangan pekerjaan seperti pembentukan kelompok usaha, usaha industri mikro, dan industri rumahtangga.

Hasil panen dari usahatani dijual dan dikonsumsi sendiri, tidak ada kendala dalam memasarkan hasil panennya. Masyarakat juga banyak yang merawat kambing dan sapi sebagai usaha sampingan. Kegiatan budidaya ternak yang berpotensi dan banyak diminati masyarakat adalah kambing dan sapi. Kesulitan yang dihadapi usaha ini adalah harga kambing yang turun, sehingga tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Harga kambing jenis PE yang dulunya Rp. 1.500.000 turun hingga Rp. 500.000. Untuk hasil panen dari usaha tani masyarakat tidak kesulitan karena permintaan untuk hasil pertanian masih banyak. Hasil panen biasanya dijual melalui tengkulak yang mendatangi petani pada saat panen ataupun dijual langsung di pasar.

Komoditas yang diminati masyarakat pada saat ini adalah cabe jawa, merica, vanili dan alpukat. Cabai Jawa merupakan solusi yang selama ini menjadi masalah petani yang menggarap lahan "tetelan" (lahan rehabilitasi) sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraannya. Sebelumnya petani di lahan "tetelan" banyak yang menanam PJ (*Purirea Javanica*) tetapi PJ bersifat merusak tanaman pokok karena tanaman tersebut merambat tanaman pokok dan rimbun sehingga banyak mengundang hama tikus (tikus bersembunyi di bawah tanaman) sehingga padi yang ditanam diserang hama tikus tersebut. Harga PJ saat ini Rp. 105.000. Tetapi mulai dua tahun belakangan ini menanam PJ tidak berhasil karena musim yang tidak menentu (kemarau "basah"). PJ tidak akan tumbuh bagus apabila terkena hujan sehingga petani banyak yang rugi. Harga cabai Jawa kering saat ini adalah Rp 60.000. Cabai Jawa baru akan menghasilkan setelah berumur minimal satu tahun. Tanaman ini tidak merusak tanaman pokok seperti PJ.

Terdapat potensi wisata yang dapat dikembangkan yaitu Pantai Naggelan, Air Terjun Watu Ondo, dan juga bisa menjadikan lahan rehab sebagai agrowisata.

b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa Penyangga Kawasan Konservasi

Pada dasarnya kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Taman Nasional Meru Betiri merupakan upaya dalam mengembangkan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat desa penyangga kawasan konservasi. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Lembaga Lembah Meru sebagai berikut:

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan TN melalui kegiatan kelompok seperti pelatihan pengolahan pupuk organik. Kegiatan tersebut berdampak pada peningkatan kemampuan anggota kelompok dalam menjalankan usaha pengolahan pupuk organik sehingga sudah sampai pada tahap meningkatnya pendapatan anggota.

Merujuk hasil penelitian (Puspiningrum, 2014) adalah bahwa Model Pembangunan Alternatif Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Meru Betiri adalah dengan menekankan pada *capacity building*. Kapasitas lokal yang dimaksud adalah kapasitas pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan swasta, Perguruan Tinggi (PT) dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan potensi alam dan ekonomi masyarakat lokal. Pengembangan kapasitas yang telah dilakukan oleh Taman Nasional Meru Betiri adalah untuk menjadikan suatu lembaga lebih efektif. Dengan demikian, kelembagaan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksudkan oleh lembaga-lembaga yang ikut serta seperti Lembaga Masyarakat Desa Hutan Konservasi (LMDHK), Lembaga Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP), lembaga Masyarakat Mitra Polhut (MMP) serta lembaga Kelompok Tani Mitra Rehabilitasi (Ketan Merah) adalah upaya mengurangi tekanan masyarakat terhadap kawasan konservasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah penyangga melalui

pembinaan/pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa penyangga dapat dilakukan dengan pengembangan kelompok usaha bersama. Menurut Isbandi dan (Isbandi & Rusdiana, 2015) bahwa kegiatan peningkatan pendapatan melalui pengembangan kelompok industri diharapkan dapat bermanfaat untuk: a) meningkatkan nilai tambah dari komoditi lokal; b) menyediakan komoditi lokal yang memiliki potensi secara komersial; c) mendorong pengembangan desa melalui kegiatan peningkatan pendapatan berdasar pada pertanian lokal; d) mendukung ketahanan pangan dalam jangka panjang; e) memberikan solusi terhadap permasalahan pengangguran dan kemiskinan terutama pada masyarakat pedesaan.

Kegiatan pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh Taman

Nasional Meru Betiri terhadap masyarakat desa penyangga kawasan konservasi dirasa belum dilakukan secara optimal karena lembaga-lembaga yang ada belum menjalankan peran dan fungsi sebagaimana yang diharapkan. Tahapan pemberdayaan yang seharusnya sudah mencapai taraf *emansipatory* pada kenyataannya masih stagnan pada taraf inisiasi karena lembaga-lembaga tersebut dalam melakukan kegiatannya masih menunggu inisiatif dari pihak Taman Nasional Meru Betiri. Sedangkan menurut (Warsono, Soetrisno, & Januar, 2014) strategi yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan konservasi Taman Wisata Alam Gunung Baung dalam upaya mengurangi perambahan hutan adalah: a) merehabilitasi sebagian kawasan TWA Gunung Baung yang sudah terlanjur terdegradasi dengan

Tabel 1
Rekayasa Sosial Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dengan Strategi dan Mekanisme Meraih Kekuasaan

Elemen Pengembangan Kapasitas	Pendekatan	Level	Kegiatan
<i>Immaterial Source</i>	Visi, misi kewirausahaan Attitude Sistem nilai	Individu	Fasilitasi dan pendampingan Pemantapan visi dan misi lembaga untuk pencapaian tujuan konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa penyangga Normalisasi dan sosialisasi nilai dan norma konservasi kepada masyarakat desa penyangga kawasan konservasi
<i>Aquisition of skill</i>	Ketrampilan dan pengetahuan SDM	Individu	Pelatihan budidaya dan kegiatan usaha ekonomi produktif yang mendukung kehidupan lembaga Pelatihan budidaya cabai jawa Pelatihan manajemen usaha
<i>Management Organization</i>	Pembesaran skala organisasi Jumlah anggota <i>diversity</i>	Kelompok	Pendampingan dan fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat desa penyangga Pelatihan manajemen organisasi untuk pengurus lembaga Pelatihan dan pendidikan berkoperasi
<i>Material Sources</i>	Infrastruktur, modal, fisik Penyokong usaha	Kelompok/ individu	pendampingan dan fasilitasi untuk membangun jejaring dengan lembaga-lembaga-lembaga yang terkait dengan pengembangan kapasitas lembaga dan pengembangan usaha ekonomi produktif Universitas sebagai sumber teknologi inovasi Lembaga keuangan sebagai pengembangan usaha ekonomi produktif

Sumber: Dharmawan, 2004 dalam Fahrudin

metode padat karya; b) mendesain paket wisata yang mampu menyerap masyarakat lokal sebagai tenaga kerja (pemandu wisata) bagi para wisatawan maupun peneliti. Merujuk hasil penelitian tersebut pengembangan kapasitas lembaga dapat pula dilakukan dengan memanfaatkan potensi wisata yang dimiliki desa dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa penyangga.

Menurut Dharmawan (2004) dalam (Fahrudin, n.d.), pengembangan kapasitas kelembagaan perlu memperhatikan aspek *immaterial sources*, *acquisition of skill*, *management organization*, dan *material sources*. Berdasarkan potensi dan kondisi sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat desa penyangga kawasan konservasi sebagaimana merujuk pada pendapat Dharmawan tersebut, pengembangan kapasitas yang dapat dilakukan oleh Taman Nasional Meru Betiri berdasarkan strategi dan mekanisme meraih kekuasaan disajikan pada Tabel 1.

Menurut Lubis (2012), untuk mencapai terbentuknya suatu kelembagaan masyarakat lokal yang berkelanjutan, sinergitas dan jejaring antar kelembagaan dan stakeholders serta terciptanya komunitas lokal yang mandiri, maka perlu dilakukan proses-proses pemberdayaan komunitas yang diimplementasikan dalam aksi: 1) Advokasi (Advocacy): Upaya untuk mengubah atau mempengaruhi perilaku penentu kebijakan: pemerintah, swasta dan stakeholders lainnya agar berpihak pada kepentingan masyarakat pedesaan dan komunitas pertanian melalui penyampaian pesan-pesan yang didasarkan pada argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, legal dan moral; 2) Pengorganisasian Komunitas (Community Organizing): agar masyarakat pedesaan dan pertanian mempunyai arena untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan atas masalah sekitarnya. Bila terorganisir, masyarakat juga akan mampu menemukan sumberdaya yang dapat mereka manfaatkan. Biasanya dalam pengembangan masyarakat,

dibentuk kelompok-kelompok petani sebagai wadah refleksi dan aksi bersama komunitas pedesaan dan pertanian; 3) Pengembangan Jejaring (Networking and Alliance Building); menjalin kerjasama dengan pihak lain agar bersama-sama saling mendukung untuk mencapai tujuan tanggungjawab sosial. Misalnya dengan kelembagaan keuangan, agribisnis, dan agroindustri. Jejaring dan saling percaya merupakan unsur penting dari modal sosial sehingga menjadi komponen penting; 4). Pengembangan kapasitas (Capacity Building): meningkatkan kemampuan warga masyarakat desa dan pertanian di segala bidang (termasuk untuk advokasi, mengorganisir diri sendiri, dan mengembangkan jejaring). Pengembangan kapasitas sebagai peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Peningkatan kemampuan individu mencakup perubahan dalam hal pengetahuan, sikap dan keterampilan; peningkatan kemampuan kelembagaan meliputi perbaikan organisasi dan manajemen keuangan dan budaya organisasi; peningkatan kemampuan masyarakat pedesaan dan pertanian mencakup kemandirian, keswadayaan, dan kemampuan mengantisipasi perubahan; dan 5). Komunikasi, informasi dan edukasi: pengelolaan informasi juga menyangkut mencari dan mendokumentasikan informasi agar informasi selalu tersedia bagi masyarakat yang memerlukannya. Seperti informasi, kegiatan edukasi perlu dilakukan agar kemampuan masyarakat dalam segala hal meningkat sehingga masyarakat mampu mengatasi masalahnya sendiri setiap saat. Untuk mendukung proses komunikasi, berbagai media komunikasi (modern-tradisional; massa-individu-kelompok) perlu dimanfaatkan dengan kreatif.

Untuk mencapai terbentuknya suatu kelembagaan masyarakat lokal yang berkelanjutan, sinergitas dan jejaring antar kelembagaan dan stakeholders serta terciptanya komunitas lokal yang mandiri

di Taman Nasional Meru Betiri maka telah dilakukan proses-proses pemberdayaan komunitas yang diimplementasikan dalam aksi advokasi dan pengorganisasian melalui pembentukan berbagai lembaga di masyarakat desa penyangga kawasan konservasi. Aksi pemberdayaan itu perlu ditingkatkan dengan melakukan pengembangan kapasitas (*capacity building*) dan pengembangan jejaring dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif. Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa penyangga berupa budaya lokal masih sangat beragam terutama tampak dalam sistem nilai budaya. Hanya ada sebagian kecil masyarakat yang memiliki orientasi nilai budaya yang berorientasi masa depan dalam mengelola Sumberdaya Alam Hutan dan Ekosistem (SDAHE). Potensi sumberdaya lokal yang dimiliki oleh masing-masing desa penyangga juga berbeda antara desa yang satu dengan desa yang lain sehingga kegiatan pemberdayaan harus memperhatikan potensi dan kearifan lokal pada masing-masing daerah tersebut (Puspaningrum, 2015).

SIMPULAN

Suatu hubungan kekuasaan yang bersifat memaksa merupakan hubungan pertukaran yang tidak seimbang yang dipertahankan melalui sanksi-sanksi negatif. Sanksi negatif juga diberlakukan pada masyarakat desa penyangga apabila melanggar aturan konservasi dari Taman Nasional Meru Betiri. Pengaruh dan hubungan kekuasaan dalam program pemberdayaan antara lembaga masyarakat desa penyangga dan Taman Nasional Meru Betiri adalah bersifat negatif dimana kesemua hubungan tersebut terjadi proses kekuasaan yang berlangsung dari pemimpin ke pengikut (dari atas ke bawah) dan ada wewenang dalam pengelolaan kawasan konservasi; Mekanisme dan strategi meraih kekuasaan terkait dengan peran hukum dan aturan belum disadari sebagai suatu perjanjian bersama antara masyarakat dan taman nasional sebagai suatu konsensus bersama sehingga memiliki kekua-

tan yang lebih dalam hidup bersama terutama dalam menjaga kawasan konservasi dari segala ancaman dan gangguan; 3) Pengembangan kapasitas yang telah dilakukan oleh Taman Nasional Meru Betiri adalah untuk menjadikan suatu lembaga lebih efektif. Kelembagaan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan mengurangi tekanan masyarakat terhadap kawasan konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah penyangga melalui pembinaan/pemberdayaan masyarakat. Pengembangan kapasitas kelembagaan perlu memperhatikan aspek *immaterial sources, acquisition of skill, management organization*, dan *material sources* berdasarkan potensi dan kondisi sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat desa penyangga kawasan konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aman. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sleman.
- Anwar, S., & Hakim, I. (2010). *Social Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kampus Balitbang Kehutanan.
- Fahrudin. (n.d.). *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Haryatmoko. (2003). Etika dan Politik Kekuasaan. *Kompas*, 22.
- Isbandi, & Rusdiana. (2015). Strategi Tercapainya Ketahanan Pangan dalam Ketersediaan Pangan di Tingkat Regional. *Agriekonomika*, 3(2), 116–131.
- Kebung, K. (2008). *Rasionalisasi dan Penemuan Ide-Ide*. Jakarta: Pretasi Pustaka.
- Khun, T. (2000). *Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*. Bandung: Remaja Rosdarya.

- Lubis, D. P. (2012). *Aksi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga: Bekal Mahasiswa Kuliah Kerja Profesi*. (A. S, T. S, & D. K, Eds.). Bogor: IPB Press.
- Miles, M., & Huberman, A. M. (1992). *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Poloma, M. M. (2004). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Puspaningrum, D. (2014). Model Pembangunan Alternatif Berbasis Masyarakat pada Taman Nasional Meru Betiri. *Agritrop Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 12(2).
- Puspaningrum, D. (2015). Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Hutan dan Ekosistem (SDAHE) pada Masyarakat Desa Penyangga Taman Nasional Meru Betiri. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 8(1).
- Soekanto, S. (2002). *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Warsono, Soetriono, & Januar, J. (2014). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Gunung Baung dalam Upaya Mengurangi Perambahan Hutan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 7(2).